

Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur

Study of the Role and Political Participation of Women in Regional Head Election in East Java

✉ **Pudji Astuti, Muhammad Arif Afandi, Handini Listyanti**
 Universitas Negeri Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.306>

ARTICLE INFO

Kajian Politik Perempuan, Pemilukada, Jawa Timur, Political participation of women, Election, East Java

Article History:

Received : Oktober 2019

Accepted : December 2019

Abstrak:

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran dan partisipasi politik perempuan di era reformasi, khususnya Pemilukada di Jatim, kondisi obyektif yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim, dan faktor penghambat partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dan kesimpulannya: 1) Partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim terbatas pada 3 tipologi, pertama, ikut serta memilih kandidat kepala daerah. Kedua, mengikuti dan tertarik isu-isu politik. Ketiga, aktif dalam proses pemilukada. 2) Faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan adalah peningkatan kualitas pribadi perempuan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi memunculkan kepercayaan diri, aktif dalam ormas, terkikisnya budaya patriarkhi, penafsiran sempit ajaran agama oleh modernisasi, dan penerapan sistem politik terbukaserta kebijakan affirmative action. 3) Faktor penghambat partisipasi politik perempuan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi personal, rendahnya pemahaman hak dan kewajiban politik, tidak mandiri secara ekonomi, inferioritas perempuan terhadap laki-laki, budaya patriarkhi masih kental, dan penafsiran ajaran agama yang sempit tentang pemimpin perempuan

Abstract:

Reacher's aims are identify roles and women's political participation in the reform era, especially in the case of Election in East Java, identify the objective conditions that affect the improvement of women's political participation in the General Election in East Java, and identifying the factors that hinder women's political participation in the General Election in East Java. Qualitative and quantitative used in this study and concluded that : (1) The political participation of women in the General Election in East Java is still limited to 3 typologies : participate in select candidates for regional head. Follow and be attracted topolitical issues. And active participation in the election process. (2) Factors that encourage women's political participation is an increase in the personal qualities of women through education, economic independence which reverses the confidence, active in organizations, erosion of patriarchal culture, and an arrow interpretation of religious teachings by modernization, implementation of open policies and political system affirmative action. (3) The factors in hibiting women's political participation is the low level of women's education and personal qualifications, lack of understanding of the rights and obligations of political, dependence economics, inferioritas woman to male, patriarchal culture that is still strong, and narrow interpretation of religious teachings about women leader.

Cite this as:

Astuti, P., Afandi, M. A., Listyani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Cakrawala*, 13(2). 184-195. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.306>.

✉ Corresponding author :

Address : Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang
 Email : pudjiastuti@unesa.ac.id
 Phone :

© 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan
 Provinsi Jawa Timur
 p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

Pendahuluan

Pengarusutamaan gender di ruang publik dan pengambilan kebijakan, menjadi nilai yang diperjuangkan kaum feminis, dan menjadi amanat global yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDG's). Perjuangan perempuan memperoleh kesetaraan dilakukan akhir abad ke-19. Kaum perempuan mencermati adanya ketidaksetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi obyek proses kultural, sosial dan politik. Dalam proses kultural, budaya patriarki memosisikan perempuan di sektor domestik, di bawah kedudukan laki-laki, begitupun hak politiknya ditentukan laki-laki. Di Amerika, perempuan mendapat hak politiknya tahun 1950-an, setelah 150 tahun merdeka.

Perempuan Indonesia terlibat pemilu sejak Pemilu 1955. Analisis politik, menunjukkan prosentase perempuan lebih besar dalam komposisi demografi, ini menguntungkan hak politiknya dalam pengambilan kebijakan publik. Artinya, jumlah perempuan yang besar, harusnya besar pula wakil legislatif perempuan. Nyatanya, jumlah anggota legislatif perempuan sedikit. Data Inter-Parliamentary Union 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-90 negara dengan prosentase perempuan di legislatif 16,8 % <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>. Keanggotaan legislatif, pada organisasi sosial politik juga sangat sedikit. Konsekuensinya, perempuan kurang optimal mengakses kepentingannya dalam kebijakan publik.

Mencermati kondisi obyektif demikian, elemen gerakan perempuan Indonesia berhasil mengarahkan kebijakan pemilu, meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan. Dimotori Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yaitu gabungan 17 partai politik, perempuan anggota DPR-RI, 38 LSM dan organisasi masyarakat seta kelompok akademisi

bergabung dalam Jaringan Perempuan dan Politik dan 78 organisasi wanita bergabung dalam Kongres Wanita Indonesia, berupaya memasukkan *affirmative action* kuota minimal 30 % perempuan dan berhasil dengan dicantumkannya Pasal 65 ayat 1 UU No 12/2003 tentang Pemilu. Hal ini dipertegas UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 8 Butir d UU No. 10/2008, disebutkan penyertaan minimal 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu syarat parpol dapat menjadi peserta pemilu. Yang dipertegas dengan Pasal 53 nya.

Affirmative action kuota perempuan dalam legislatif mejamin harapan perluasan partisipasi perempuan di ruang politik lainnya. Konteks pemilu lokal misalnya, banyak kandidat perempuan ikut pemilukada, bahkan berhasil menjadi kepala daerah, seperti di Kabupaten Banyuwangi (Ratna Ani Lestari), Kabupaten Tuban (Haeny Relawati), Kota Surabaya (Tri Risma Harini), Kabupaten Probolinggo (Tantri Hasan Aminudin) dll. Hingga tahun 2011, ada 16 orang bupati/walikota dan satu orang gubernur perempuan (Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2011).

Hal ini membuktikan semakin terbukanya ruang politik bagi perempuan. Tetapi, tidak lantas dimaknai sebagai akhir upaya pengarusutamaan *gender* di Indonesia. Keterlibatan perempuan di dunia politik masih dianggap pelengkap pesta politik yang didominasi laki-laki. Tidak sedikit caleg perempuan maju hanya menjual feminitas dan popularitas. Kasus pemilukada, ditemukan kandidat perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya menjadi penerus kepemimpinan politik dinasti. Kondisi ini menarik untuk dikaji. Terutama untuk mengetahui peran dan bentuk partisipasi politik perempuan dalam pelaksanaan

pemilukada. Adapun permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana peran dan partisipasi politik perempuan pada Pemilu di Jatim ?
2. Faktor apakah pendorong perempuan ikut berperan dalam Pemilu di Jatim ?
3. Kondisi obyektif apa yang menjadi penghambat perempuan di pemilu di Jatim ?

Tinjauan Pustaka

Gender, Kesetaraan dan Posisi Sosial Perempuan

Kata “*gender*” diartikan perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat sosialisasi generasi ke generasi. Menurut berbagai pustaka gender diartikan sebagai berikut:

“*Gender should be conceptualized as a set of relations, existing in social institutions and reproduced in interpersonal interaction*” (Smith, 1987), gender merupakan hubungan nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal.

“*Gender is not a property of individuals but an on going interaction between actors and structures with tremendous variation across men’s and women’s lives “individually over the life course and structurally in the historical context of race and class”* (Ferree, 1990).

Gender bukan *property individual* namun interaksi antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan „secara individual“ sepanjang hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas.

“*At the ideological level, gender is performatively produced*” (Butler, 1990). Pada tingkat ideologi, gender dihasilkan. Artinya, gender menyangkut aturan sosial berkaitan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan kedudukan menimbulkan ketidakadilan

yang berakar pada sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Ini terjadi karena keyakinan dan pembedaan ditanamkan sepanjang peradaban menimpa perempuan dan laki-laki. Secara agregat ketidakadilan gender lebih banyak dialami perempuan, namun berdampak pada laki-laki. Bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi meliputi :

1. Marginalisasi perempuan, akibat pembangunan yang fokus pada laki-laki, berdampak kemiskinan.
2. Subordinasi, keyakinan kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki – laki.
3. *Stereotype*, bersifat negatif berdampak ketidak-adilan pada salah satu jenis kelamin.
4. Kekerasan, serangan fisik/non fisik pada perempuan/laki-laki mengusik batinnya.
5. *Double burden* bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

Jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat.

Pemilihan Umum, Pemilu dan Partisipasi Politik

Sistem politik demokrasi, pemilu yang jujur, bebas dan adil merupakan keniscayaan. Sistem politik apapun di suatu negara, menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi sistem politik yang dibangunnya. Dapat dimengerti, jika pemilu dijalankan sesuai prinsip demokrasi, maka demokratislah suatu negara. Namun pemilu bukan satu-satunya indikator tegaknya sistem politik demokrasi, sebab demokrasi membutuhkan persyaratan lain, adanya kebebasan menyuarakan pendapat, berorganisasi dan lain-lain.

Alasan pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi, antara lain :

1. Pemilu memungkinkan masyarakat

politik melakukan pergantian kekuasaan secara damai, tanpa ada pertumpahan darah maupun kekacauan.

2. Pemilu menimbulkan pelembagaan konflik, mengingat sistem demokrasi menuntut kebebasan dalam menyuarakan pendapat, kepentingan dan konflik secara terbuka. Secara konseptual ada dua mekanisme menciptakan pemilu yang bebas dan adil :

Pertama, menciptakan aturan memindahkan suara pemilih dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, disebut dengan sistem pemilihan (*electoral system*). Kedua, menjalankan pemilu sesuai aturan main dan prinsip demokrasi, disebut sebagai proses pemilihan (*electoral process*).

Syarat minimal pemilu dijalankan secara demokratis, bila pemilu dijalankan secara bebas dan adil (*free* dan *fair*), sehingga tercipta kondisi persaingan sehat (kompetitif).

Syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Adanya hak pilih yang universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*)
2. Adanya proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*),
3. Adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan kandidatnya, sehingga pemilih mempunyai banyak pilihan diantara calon yang berbeda, baik secara kelompok maupun program-programnya.

Di Indonesia, terminologi pemilu semakin luas dengan disahkannya UU Pemda No. 32/2004, yang merevisi UU 22/1999 mengatur Pilkada Langsung. Jika sebelumnya kepala daerah dipilih DPRD, sejak itu dipilih langsung warga masyarakat. Di Indonesia ketentuan pemilihan umum tingkat lokal masuk dalam rezim UU Pemda. Padahal sudah ada UU khusus yang mengatur pemilu. Disahkannya UU no 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu,

PILKADA masuk dalam rezim UU Pemilu, dengan istilah Pemilukada, dan berubah kembali dengan disahkannya UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan istilah Pilgub, Pilbup dan Pilwali.

Menurut Myron Wiener ada 5 sebab gerakan partisipasi politik lebih luas (Almond, 1974). 1. Modernisasi, 2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas sosial. 3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. 4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, 5. Keterlibatan Pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Penguatan Kesetaraan Gender melalui partisipasi politik

Wurianto (2009) berpendapat implementasi pengarusutamaan gender di berbagai bidang, diharapkan perempuan Indonesia berpartisipasi secara proposional dalam politik. Kesetaraan dan keadilan gender dalam politik perlu ditumbuhkembangkan sejalan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia yang demokratis.

Partisipasi politik merupakan aspek penting politik. Partisipasi politik bagi perempuan merupakan aktifitas politik, dengan jalan memimpin negara, bidang legislatif, maupun eksekutif, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Herbert Mc Closky, dalam Wurianto (2009) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat melalui pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung proses pembentukan kebijakan umum. Secara teoritis, partisipasi politik individu ada yang tergolong a-politik, penonton, partisipan dan aktivis, demikian pula halnya dengan bentuk partisipasi perempuan dalam politik.

Indonesia mengalami proses pendewasaan politik sejak reformasi 1998. Partisipasi politik perempuan Indonesia terlihat di pimpinan organisasi, perempuan di kursi DPR, kepala daerah dan Presiden

Megawati Soekarno putri. Hal itu belum menggambarkan keberhasilan perempuan Indonesia dalam kancah politik. Skenario politik perempuan Indonesia dikenal dengan program WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*) dan GAD (*Gender and Development*).

Keterwakilan perempuan di parlemen timpang. Penyebabnya (Agustina, 2009):

1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
5. Kurangnya *political will* pemerintah
6. Kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik

UUDDRI 1945, mencerminkan perempuan dan laki-laki sama untuk dipilih dan memilih, namun posisi perempuan masih termajinakan dalam partisipasi politik. Menurut Nantri (dalam Wahyuni dan Esti, 2009), ada 2 faktor penyebabnya :

1. Faktor internal, (sumber daya, pandangan politik itu keras, stereotipe pada wanita)
2. Faktor eksternal, (sistem pemilu, peran partai politik, nilai budaya)

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik (Wahyuni dan Esti, 2009) :

1. Anggapan perempuan bahwa politik itu keras dan itu dunia laki-laki
2. Banyak perempuan tidak senang berorganisasi
3. Perempuan kurang memanfaatkan potensi dirinya
4. Perempuan sering kurang percaya diri

Perwakilan politik perempuan menurut Lovenduski ada dua (Katriana, 2012) yaitu Perwakilan Deskriptif dan Perwakilan Substantif

Phillips, Katriana (2012) menyebutkan 3 argumen pendukung tuntutan perwakilan perempuan yaitu argumen Keadilan,

argumen Pragmatis dan argumen perbedaan

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif ini dilaksanakan pada tahun 2016 di Kabupaten Tuban, Banyuwangi, Tulungagung dan Jombang. Kabupaten Tuban dan Banyuwangi dipilih karena pernah dipimpin Kepala Daerah perempuan hasil pemilukada. Jombang dipilih karena Wakil Bupati perempuan. Kabupaten Tulungagung dipilih karena belum pernah dipimpin oleh perempuan.

Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif melalui survey dan observasi, sedangkan kualitatif melalui *indepth interview*. Data yang digunakan gabungan data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif untuk memperkaya hasil penelitian yang didapat dengan *indepth interview*.

Respondennya pemilih perempuan dan subyek elit politik (praktisi politik, anggota tim sukses, penyelenggara pemilu, birokrasi pemda dan sebagainya). Responden ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan lokasi yang mewakili wilayah Utara Jatim (Tuban), Selatan (Tulungagung), Tengah (Jombang) dan Timur (Banyuwangi).

Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran dan partisipasi politik perempuan dalam pemilukada, baik sebagai pemilih maupun aktifis. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran proses pemilukada dan kondisi obyektif masyarakat. Sedang *indepth interview* untuk mengungkap keterlibatan perempuan dalam proses politik di pemilukada.

Data kuantitatif yang terkumpul diedit, dikoding dentry sesuai keperluan dan tujuan penelitian. Data dianalisis dengan bantuan program SPSS untuk menghitung indeks partisipasi politik. Indeks Partisipasi politik yang digunakan mengadopsi instrumen "Individual

Participation in Citizen Political Action” yang dipublikasikan oleh *League of Women Voters of Pennsylvania, publication No.101, Philadelphia*. (Miller, 1977). Data kualitatif dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Analisis dimulai dari analisis kategorial, dan perbandingan dari 4 kabupaten yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perempuan Indonesia di Ranah Publik

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013, ada peningkatan jumlah keterpilihan caleg perempuan di pemilu legislatif 2009 dibanding pemilu tahun 2004, karena Pasal 65 ayat 1 UU No 12/2003 tentang Pemilu, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30%” dan dipertegas Pasal 8 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan Pasal 53 UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.

Peningkatan jumlah perempuan terpilih sebagai wakil rakyat mengindikasikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran perempuan di dunia politik. Namun kuota perempuan belum mencapai 30 %.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria di dunia politik berakibat keterkaitan perempuan di badan Legislatif kurang memadai, padahal mayoritas pemilih Indonesia adalah perempuan, data anggota MPR-DPR RI periode 2009-2014 per 16 Juli 2012, menunjukkan anggota DPR perempuan sebanyak 101 dari 560 anggota DPR (18 %). Anggota MPR perempuan 138 orang (20 %) dari total anggota MPR 692 orang (Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diakses dari www.kemenpppa.go.id).

Parpol merupakan wadah perempuan untuk pemberdayaan politik, juga merupakan jenjang menjadi anggota parlemen. Berdasarkan parpol, jumlah perempuan anggota legislatif banyak

dari Partai Demokrat (36 orang), ini wajar mengingat Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu periode 2009-2014. Secara persentase, jumlah anggota perempuan dari PKB yang paling tinggi sekitar 25 %, sedang terendah PKS 3,51 %. Untuk DPD, ada 28 % perempuan dan 72 % laki-laki.

Di tingkat pemerintah pusat, dari 34 kementerian, ada 4 menteri perempuan yaitu: menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri Kesehatan, dan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di level provinsi hanya Banten yang dipimpin oleh perempuan, terpilih sejak 2007 sampai sekarang. Tahun 2011 ada 16 bupati dan walikota perempuan dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibanding yang menjadi gubernur. Secara prosentase, perempuan yang menjadi gubernur relatif sama dibandingkan perempuan yang menjadi bupati/walikota, yaitu 3,03 % berbanding 3,22 %

Di tingkat desa/kelurahan, umumnya kepala desa/lurah adalah laki-laki. Kepala desa/lurah perempuan hanya 5 %. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi seseorang menjadi kepala desa/lurah. Sebagian besar kepala desa/lurah, baik laki-laki maupun perempuan berpendidikan minimal SMA atau SMTA.

Indeks Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu di Jawa Timur

Peran dan partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Jatim diukur dengan instrumen baku yang digunakan oleh *League of Women Voters of Pennsylvania, publication No.101, Philadelphia*. (Miller, 1977). Instrumen disesuaikan dengan konteks pemilu di Indonesia dengan mengukur 6 variabel partisipasi politik meliputi:

1. Keikutsertaan dalam pemilu lokal/

- pemilukada
2. Pengetahuan dan ketertarikan terhadap isu-isu publik/politik
 3. Aksi individual terhadap isu-isu publik/politik
 4. Aksi kelompok terhadap isu-isu publik/politik
 5. Keterlibatan aktif dalam proses pemilukada
 6. Dukungan pendanaan terhadap aktifitas pemilukada

Pengukuran Indeks Partisipasi Politik Perempuan di Jawa Timur, dilakukan dengan cara menggabungkan responden di 4 kabupaten yang dijadikan sampel, sehingga total sampel yang diukur sebanyak 100 responden.

Hasil Indeks Partisipasi Politik perempuan di Jawa Timur diuraikan dalam

Tabel 1 .

Data menunjukkan bahwa nilai Indeks Partisipasi Politik Perempuan dalam pemilukada di Jawa Timur sebesar 4,45 atau masuk dalam kategori “partisipasi politik menengah”.

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik Perempuan

Di Indonesia, isu kepemimpinan perempuan di ruang publik, menjadi diskusi utama ketika membahas keterlibatan perempuan dalam proses politik. Mereka yang setuju dengan kepemimpinan perempuan, memiliki spektrum lebih luas berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Sebaliknya mereka yang mengambil posisi tidak setuju, cakrawala pemikirannya

Tabel 1 Indeks Partisipasi Politik Perempuan di Jawa Timur

No	Variabel	Indikator	Skor	Indeks
1	Ikut memilih dalam pemilu lokal/pemilukada	1 Ikut memilih bupati minimal satu kali dalam 2 pemilukada terakhir	99	4,45
		2 Ikut memilih gubernur minimal satu kali dalam 2 pemilukada gubernur terakhir	91	
		3 Selalu ikut memilih (4 kali) dalam pemilukada bupati dan gubernur	76	
2	Pengetahuan terhadap isu-isu publik/politik	4 Mengikuti perkembangan informasi tentang isu-isu publik	55	
		5 Ikut mendiskusikan isu-isu publik dengan pihak lain (keluarga, teman, kolega dll)	44	
3	Aksi individual terhadap isu-isu publik/politik	6 Pernah menyampaikan aspirasi/kritik/protes terhadap pejabat publik/politisi	13	
		7 Pernah melakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu satu tahun terakhir	7	
4	Aksi kelompok terhadap isu-isu publik/politik	8 Pernah menyampaikan aspirasi/kritik/protes secara berkelompok	9	
5	Keterlibatan aktif dalam proses pemilukada	9 Ikut mendiskusikan dalam kelompok tentang kualifikasi kandidat yang ideal	38	
		10 Ikut terlibat dalam tim sukses/pemenangan kandidat Bupati	8	
		11 Ikut terlibat dalam tim sukses/pemenangan kandidat Gubernur	5	
6	Dukungan pendanaan terhadap aktifitas pemilukada	12 Ikut memberikan bantuan dana/materi dalam aktifitas pemilukada	0	
				445

Sumber: Data Primer Diolah

tentang perempuan di ruang publik lebih sederhana. Bahkan mengambil garis batas yang jelas antara ruang privat dengan ruang publik, ruang pengambilan keputusan (*decision making*) dengan ruang administratif dan sebagainya.

Pendapat terhadap pemimpin perempuan menunjukkan 78 % memilih perempuan setuju jika perempuan menjadi pemimpin politik. 22 % tidak setuju. Data ini menggambarkan perempuan sendiri masih ada yang beranggapan tidak seharusnya perempuan menjadi pemimpin di ruang-ruang publik. Artinya, terdapat beberapa aspek dan pertimbangan yang dijadikan dasar perempuan untuk tetap setuju dengan kondisi bahwa laki-laki yang menjadi pemimpin.

78 % responden yang setuju pemimpin perempuan, sebanyak 51,3 % menyatakan posisi laki-laki dan perempuan setara. 30,8 % menyatakan memilih karena kualitas pribadi yang bersangkutan. Artinya posisi laki-laki dan perempuan setara, namun kualitas tergantung pribadi masing-masing. Argumentasi lain yang setuju menyatakan perempuan lebih unggul dari sisi ketegasan dan ketekunan. 10,2 % responden setuju dengan pendapat ini. 5,1 % menyatakan alasan karena yang tahu kepentingan perempuan adalah perempuan sendiri. 2,6 % menyatakan zaman telah berubah, pandangan terhadap pemimpin perempuan juga berubah.

Alasan utama memilih perempuan tidak setuju pemimpin perempuan karena kepercayaan yang menjadi imam adalah laki-laki 72,7 %. 13,6 % berpendapat laki-laki lebih rasional dari perempuan. Argumentasi lain menyatakan laki-laki lebih kuat secara mental dan fisik dari perempuan 9,2 %. 4,5 % menyatakan perempuan lebih mulia berperan sebagai ibu rumah tangga.

Uraian di atas menjadi gambaran umum posisi perempuan terhadap isu dan permasalahan kepemimpinan perempuan.

Data tersebut juga menjadi tolok ukur untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi mendorong dan menghambat partisipasi perempuan dalam pemilukada di Jawa Timur.

1. Faktor Internal

Terminologi *agent* dan struktur, perempuan sebagai agen bertindak bebas dalam merespon dan menentukan sikapnya. Sehingga besarnya tekanan struktural, tidak merubah pandangan dan sikapnya sebagai individu. Faktor ada dua perspektif, muncul sebagai pendorong dan menghambat keterlibatan perempuan dalam proses politik. Hal ini diuraikan sebagai berikut.

Pandangan terhadap politik

Keterlibatan perempuan di ranah politik, menunjukkan 60 % memilih perempuan menyatakan berpolitik kewajiban warganegara, 37 % berpolitik adalah hak warganegara, dan 3 % tidak menjawab. Menganalisis partisipasi politik perempuan dengan melihat pandangan memilih perempuan terhadap “politik” menjadi penting untuk dilakukan.

Konteks partisipasi politik perempuan, menarik ketika memilih perempuan memaknai politik sebagai kewajiban bukan hak. Jika demikian, maka derajat partisipasi politik perempuan tergantung pada negara dalam menuntut kewajiban warganya. Artinya posisi dan peran perempuan dikonstruksikan melalui serangkaian kewajiban yang termuat dalam perundang-undangan. Sehingga peran perempuan cenderung pasif. Sedang yang melihat dalam dimensi “hak” cenderung aktif dalam dinamika politik.

Pemilih perempuan di Jatim menempatkan dirinya sebagai obyek politik bukan subyek politik. Sehingga Indeks Partisipasi Politik Perempuan masih di level “menengah”.

Tingkat pendidikan

Pendidikan memungkinkan individu melakukan mobilitas sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Individu tidak lagi terkekang dengan lingkungan sosialnya, bahkan dapat merujuk lingkungan sosial yang berbeda dalam mengambil sikap politik.

Semakin tinggi pendidikan maka semakin setuju dengan kepemimpinan perempuan. Di tingkat pendidikan SD angka yang setuju sebesar 69,6 %, sedang pendidikan Diploma dan Sarjana memiliki nilai 100 %.

Data tingkat pendidikan jika ditabulasi silang dengan persepsi terhadap politik menunjukkan bahwa pendidikan SD sebanyak 82,6 % melihat politik dari perspektif “kewajiban”, sedang 17,4 % menyatakan politik sebagai “hak”. Responden dengan tingkat pendidikan diploma dan sarjana melihat politik dalam dimensi hak sekitar 60 - 100 %.

Profesi/Pekerjaan

Perempuan yang sadar bahwa politik merupakan hak adalah mereka yang bekerja dan memiliki aktifitas formal lain dalam kehidupan sosial. Pemilih perempuan yang tidak bekerja melihat politik dalam dimensi “kewajiban”. Seding urutan kedua dari pemilih perempuan yang melihat politik dengan perspektif “kewajiban” adalah ibu rumah tangga. 81,8 % ibu rumah tangga memaknai politik sebagai “kewajiban”.

Profesi lain, perempuan yang bekerja sebagai pengajar 60 % menyatakan politik merupakan hak. Diikuti Wiraswasta 55 %, pelajar 41,7 %, petani 31,3 %, PNS dan sektor informal masing-masing 25 %.

Tingkat Penghasilan

80 % pemilih perempuan yang tidak berpenghasilan menyatakan bahwa politik merupakan kewajiban. 20 % melihatnya sebagai hak warganegara. Jika dikaji antara penghasilan dengan isu kepemimpinan

perempuan, maka semakin setuju dengan wacana kepemimpinan perempuan. Penghasilan di bawah 500 ribu/bulan hingga di atas 2 juta/ bulan, terus meningkat dari 71,4 % hingga 100 %. Seding pada segmen perempuan tidak berpenghasilan, angka persetujuan sedikit di atas responden berpenghasilan di bawah 500 ribu. Ini karena kategori tidak berpenghasilan terdapat segmen pelajar dan mahasiswa, yang secara kuantitatif lebih banyak mendukung kepemimpinan perempuan.

2. Faktor Eksternal

Budaya

Budaya patriarki mempengaruhi partisipasi politik perempuan mereka berpendapat bahwa politik masih menjadi ranah eksklusif laki-laki. Di Jatim, diketahui bahwa pemilih perempuan yang memutuskan pilihannya secara mandiri tanpa dipengaruhi pihak lain sebesar 76 %. 24 % tidak mandiri.

Nilai-nilai ajaran Agama

Sebagian besar pemilih perempuan memutuskan pilihan politiknya dengan mempertimbangkan faktor keluarga. 39 % menyatakan keluarga adalah pihak pertama yang dijadikan pertimbangan dalam memilih, kemudian tokoh masyarakat. 21 % menyatakan dalam memutuskan pilihan politik mempertimbangkan arahan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat.

Pertimbangan keluarga secara operasional merujuk pada suami, sedang tokoh masyarakat melekat pada tokoh agama dan kepala desa. Dari 4 kabupaten yang diteliti, Kabupaten Tuban mewakili tradisi masyarakat santri pesisiran. Jombang dan Tulungagung merepresentasi pedalaman dan wilayah selatan dengan tradisi Jawa Pedalaman. Sedingkan Banyuwangi mewakili wilayah tapal kuda/blambangan dengan sub-etnik Osing (Sadewo dan Maliki, 2001).

Lingkungan Sosial (Keluarga dan Organisasi Massa)

Data di atas menunjukkan mayoritas pemilih perempuan merujuk pada keluarga dalam memutuskan masalah politik yang dipengaruhi budaya patriarki dan ajaran agama yang diterjemahkan secara parsial.

Fenomena ini diperkuat dengan data tabulasi silang antara status pernikahan dengan pandangan terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan yang terikat perkawinan cenderung tidak setuju kepemimpinan perempuan. 25 % tidak setuju pemimpin perempuan. Perempuan yang bercerai 14,3 % tidak setuju kepemimpinan perempuan. Perempuan yang belum menikah 17,2 % tidak setuju pemimpin perempuan.

Ketelibatannya perempuan dalam organisasi massa menjadi aspek yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Perempuan yang aktif dalam organisasi sosial cenderung memaknai politik sebagai "hak" jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak menjadi anggota ormas. 44 % menyatakan politik sebagai "hak", sedang yang tidak aktif di ormas 30 % melihat politik dari perspektif "hak".

Sistem Politik

Sistem politik demokratis terbuka, ditunjang dengan *affirmative action* melalui kuota perempuan dalam legislatif memberi jaminan dan harapan perluasan partisipasi perempuan di ruang politik. Praktiknya masih memunculkan pro dan kontra (Ratnawati, 2004). Kelompok pro kuota, melandaskan pemikirannya pada beberapa aspek. Pertama, adanya kuota 30 % bukan mendiskriminasi perempuan, tetapi memberikan kompensasi hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam politik. Kedua, kuota memperlihatkan secara tidak langsung wakil perempuan yang duduk di lembaga politik, sehingga dapat

meminimalisir tekanan yang dialami perempuan secara struktural. Ketiga, kuota menunjukkan perempuan mempunyai hak representasi sama. Keempat, pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik. Kelima, berbicara kuota adalah soal presentasi, bukan kualifikasi. Keenam, perempuan memiliki kualitas sama dengan laki-laki, tetapi kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki. Ketujuh, fakta bahwa sampai sekarang parpol menentukan pencalonan, bukan, masyarakat pemilih. Kedelapan, menerapkan sistem kuota mungkin menyebabkan konflik, tetapi yang bersifat sementara.

Kelompok yang menolak, mendasarkan argumentasinya pada : Satu, kuota menentang prinsip kesetaraan. Kedua, kuota tidak demokratis. Ketiga, kuota memperlihatkan bahwa politisi dipilih karena *gender*-nya, bukan kualifikasinya. Keempat, fakta banyak perempuan tidak ingin dipilih karena mereka perempuan. Kelima, penerapan kuota memunculkan konflik yang signifikan dalam organisasi politik

Simpulan

Penelitian dengan judul "Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu di Jatim" mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Jatim dikategorikan 3 tipologi : (1) memilih kandidat kepala daerah 88,3 %; (2) mengikuti dan tertarik terhadap isu politik 49,5 %; (3) aktif dalam pemilu 17 %. Ini menggambarkan partisipasi perempuan dalam pemilu terbatas ditingkat partisipasi *electoral*, belum pada tahapan mengkritisi kebijakan secara personal atau berkelompok dan memberikan donasi terhadap proses politik. **Kedua**, partisipasi politik perempuan di 4 Kabupaten yang dijadikan sampel

cenderung sama. Partisipasi politik identik dengan keikutsertaan dalam memilih kandidat. **Ketiga**, perhitungan Indeks Partisipasi Politik perempuan di Jatim berada di angka “4,45” atau masuk kategori “partisipasi politik menengah”. **Keempat**, perhitungan Indeks Partisipasi Politik di tiap kabupaten sebagai berikut : Kabupaten Tuban “4” (Partisipasi Politik Rendah), Kabupaten Jombang “4,84” (Partisipasi Politik Menengah), Kabupaten Tulungagung “4,6” (Partisipasi Politik Menengah) dan Kabupaten Banyuwangi “4,36” (Partisipasi Politik Menengah). **Kelima**, pengalaman pernah dipimpin bupati perempuan tidak otomatis meningkatkan derajat partisipasi politik perempuan. **Keenam**, mayoritas pemilih perempuan beranggapan keterlibatan dalam politik kewajiban warganegara. Hanya sebagian kecil yang menganggap sebagai hak. **Ketujuh**, sebagian besar pemilih perempuan setuju terhadap kepemimpinan perempuan (78 %). 22 % menyatakan tidak setuju. **Kedelapan**, argumentasi yang setuju karena posisi sosial laki-laki dan perempuan setara (51,3 %); memilih pemimpin mendasarkan kualitas pribadi yang bersangkutan (30,8 %); perempuan lebih unggul dari sisi ketegasan dan ketekunan dari laki-laki (10,2 %) alasan memilih perempuan, yang tahu kepentingan perempuan adalah perempuan (5,1 %) dan perubahan zaman merubah pandangan terhadap pemimpin perempuan (2,6 %). **Kesembilan**, argumentasi yang tidak setuju karena kepercayaan yang menjadi imam adalah laki-laki (72,7 %); laki-laki lebih rasional dari perempuan (13,6 %); laki-laki lebih kuat dari perempuan (9,2 %) dan menyatakan perempuan lebih mulia berperan sebagai ibu rumah tangga (4,5 %). **Kesepuluh**, faktor-faktor pendorong partisipasi politik perempuan adalah peningkatan kualitas pribadi perempuan melalui pendidikan; kemandirian ekonomi ;aktif dalam ormas; terkikisnya

budaya patriarki dan penafsiran sempit terhadap ajaran agama oleh modernisasi; penerapan sistem politik demokratis dan kebijakan *affirmative action*. **Kesebelas**, faktor penghambat partisipasi politik perempuan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi personal perempuan; rendahnya pemahaman hak dan kewajiban politik; tidak mandiri secara ekonomi; inferioritas perempuan terhadap laki-laki; patriarkhil; penafsiran ajaran agama yang sempit tentang pemimpin perempuan. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajiban politiknya sebagai warganegara melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. **Kedua**, meningkatkan jumlah dan kualitas perempuan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. **Ketiga**, mendesain program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan membekali keahlian (*skill*) dan bantuan permodalan bergulir terhadap individu maupun kelompok. **Keempat**, mendesain bantuan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi-organisasi perempuan. **Kelima**, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan simpul-simpul organisasi perempuan. **Keenam**, dengan terbentuknya jaringan organisasi perempuan, langkah selanjutnya untuk dapat secara efektif memperjuangkan aspirasi perempuan adalah dengan membangun akses yang luas terhadap media. **Ketujuh**, membangun dialog dan komunikasi secara intensif dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berpengaruh di masyarakat, terutama yang berbasis keagamaan dan tradisi, untuk mengkampanyekan isu pengarusutamaan gender di berbagai ruang publik. **Kedelapan**, membangun dialog dan komunikasi di tingkatan elit dan pemangku kebijakan dalam rangka membangun

komitmen bersama untuk mewujudkan pengarusutamaan di berbagai ruang publik. **Kesembilan**, melanjutkan dan memperkuat kebijakan afirmatif yang telah berjalan mengenai kuota perempuan 30 persen dalam proses pencalegan, komposisi pengurus partai di tingkat pusat dan komposisi pimpinan dewan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Heriyani. 2009. *Gender and Politics: Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Almond, Gabriel. 1974. *Comparative Politics Today : A World View*. Little. Brown.
- Duverger, Maurice. 2007. *Sosiologi Politik*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung. Nusa Media
- Katriana. 2012. *Perempuan dan Politik*. Tidak diterbitkan.
- Leal, David, L. 2006. *Electing America's Governors: The Politics Of Executive Elections*, New York. Palgrave Macmillan.
- Lau, Richard dan David P Redlawsk. 2006. *How voters Decide : information processing during election campaign*. Cambridge University Press. New York.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah : Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya. Pustaka Eureka & PusDeHAM.
- Mas' oed, Muchtar dan Andrew, Collin Mc. 1987. *Perbandingan sistem politik.*, Yogyakarta. Gadjah Mada University press.
- Miller, Delbert C. *Handbook of Research Design and Social Measurement*. 3rd edition. New York. David Mckay Company.
- Sugiyono. 2003. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Surbakti. Ramlan. 1998. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo
- Wuriyanto, Arif Budi. 2009. *Gender and Politics, Penyiapan Pendidikan Politik bagi Perempuan melalui Pengembangan Kurikulum Berwawasan HAM: Sebuah Perspektif Teori Kritis*. Yogyakarta. Tiara Wacana.